

PENGARUH KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Fitri Ernalis

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Almuslim

ABSTRAK

Sumber daya manusia sangat mempunyai pengaruh penting untuk meningkatkan kualitas pegawai dan pelayanan terhadap masyarakat serta di dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Rumusan masalah yang dikemukakan di dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh sumber daya manusia terhadap pelaksanaan otonomi daerah, jika sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah maka sumber daya manusia haruslah ditingkatkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan cara-cara observasi, wawancara dan kuisioner. Metode yang digunakan adalah metode korelasi dengan analisis deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti dengan tujuan pemecahan masalah, sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan sampel 32 orang dan bersifat kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data melalui korelasi product moment. Sedangkan untuk menguji tingkat signifikansi kedua variabel digunakan rumus uji r dan berdasarkan pengujian tingkat signifikansi dengan menggunakan uji r 0,334 yang lebih kecil r tabel yakni 0,449. Berarti hipotesa dalam penelitian adalah H_0 (ditolak). Ini berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X (kesiapan sumber daya manusia) terhadap variabel Y (pelaksanaan otonomi daerah).

Kata kunci: *Sumber Daya Manusia dan Otonomi Daerah*

PENDAHULUAN

Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nuansa ini tidak saja dirasakan oleh pemerintah, namun juga pada level pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Beralihnya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi yang ditandai dengan perubahan UU No.22 Tahun 2000 menjadi UU No.34 Tahun 2004, mengubah sistem pemerintahan dari monistik sentralistik dipemerintah pusat menjadi lokal demokrasi di pemerintah daerah. Bertambahnya wewenang pemerintahan yang diterima pemerintah daerah dalam menerima wewenang tersebut. Konsekuensi inipun harus diterima secara bersama-sama sebagai bentuk kemandirian daerah, bukan saja kewenangan tapi juga tanggung jawab pengelolaannya.

Ada beberapa hal dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni menyangkut: kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja sama, lingkungan kondusif dan akuntabilitas. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah dengan sifatnya yang dinamis dan aktif. Permasalahan sumber daya manusia terasa semakin diperhatikan oleh pemerintah, hal ini semakin sejalan dengan peningkatan volume pembangunan bangsa pada masa sekarang ini. Dengan kondisi dan situasi saat ini yang sedemikian rupa maka tiap-tiap sektor dan sub sektor pemerintah dihadapkan kepada suatu keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman yang menuntut penyediaan pegawai yang berkualitas serta memahami maksud dan tujuan serta fungsi otonomi daerah dan mengetahui seluk beluk wilayahnya sekaligus menerapkan otonomi di daerahnya.

Kantor Camat Kecamatan Sipirok merupakan salah satu organisasi kerja Depertemen Dalam Negeri juga tidak luput dari permasalahan sumber daya manusia para pegawainya yang belum banyak mengerti tentang pelaksanaan otonomi daerah bahkan tak paham benar tentang otonomi daerah yang baru yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana diatur dalam pembukaan UUD 1945 dan mempertahankan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia serta menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah yang ada di Republik Indonesia. Sejak dahulu Otonomi daerah telah dibicarakan dan ditandai dengan terbitnya Undang-undang No.5 Tahun 1974 tetapi karena perkembangan serta keadaan dan tekanan pada zaman orde baru di lapangan UU No. 5 Tahun 1974 tidak berguna dan tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan kepada daerah dan kebanyakan ditentukan oleh pejabat di Pusat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan mengungkapkan kemampuan sumber daya manusia di dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja dibidangnya masing-masing. Penelitian ini mengangkat suatu masalah yang berlangsung pada saat sekarang sebagai suatu masalah yang aktual dan penjabarannya diuraikan sebagai mana adanya, oleh karena itu dipergunakan metode korelasional untuk memecahkan permasalahan.

Dari penelitian ini peneliti menggunakan metode korelasional yaitu penelitian yang bertujuan untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel dalam suatu populasi. Dalam hal ini peneliti mempunyai tujuan untuk menentukan ada tidaknya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk mendapatkan data yang objektif peneliti mengambil atau menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yaitu suatu cara melakukan pengumpulan berdasarkan informasi atau keterangan kepustakaan
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu cara menghimpun data atau berbagai gejala lainnya yang ada dilapangan secara : (a) Observasi langsung yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pekerjaan dan dilaksanakan hingga selesai. (b) Dengan menggunakan interview atau wawancara. (c) Dengan memberikan daftar *questioner* untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah dengan cara menguraikan data-data yang telah dihasilkan melalui observasi, wawancara dan penyebaran angket. Dalam hal ini metode yang peneliti lakukan ialah melalui korelasi antara dua variabel yaitu variabel X pendidikan dan latihan sedangkan variabel Y kemampuan kerja disamping itu digunakan variabel antara.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum IY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menyajikan data dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa cara untuk mengambil data yang ada, setelah data terkumpul khususnya hasil dari quisioner yang peneliti dapatkan dari responen yang berada di kantor camat Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 32 orang. Dalam mengubah data kualitatif kedalam kuantitatif, peneliti mengklasifikasikan jawaban yang telah dijawab oleh responden melalui quisioner yang ada.

Adapun pengklasifikasian jawaban tersebut adalah

1. Untuk jawaban A diberikan nilai 3 (Sangat mengerti)

2. Untuk jawaban B diberikan nilai 2
(Cukup mengerti)
3. Untuk jawaban C diberikan nilai 1
(Kurang mengerti)

Variabel bebas X

1. Pengertian otonomi daerah
2. Tugas pokok dan fungsi yang ditempati
3. Program pendidikan dan pelatihan
4. Penataran/diklat dalam bidang pelaksanaan otonomi daerah
5. Setelah menjalani diklat, kemampuan dan keterampilan pegawai meningkat
6. Kemampuan tugas-tugas yang diberikan pihak atasan
7. Setuju dengan pelaksanaan otonomi daerah
8. Sikap pimpinan dengan bawahan
9. Sikap pegawai dengan adanya otonomi daerah
10. Pertanggung jawaban pihak kecamatan terhadap tugas yang diberikan atasan
11. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan atasan
12. Tanggung jawab bertambah dengan adanya otonomi daerah
13. Loyalitas pegawai
14. Sikap pimpinan dalam upaya yang tepat untuk meningkatkan loyalitas pegawai
15. Sanksi yang diberikan pimpinan bagi pegawai yang tidak loyal

Variabel terikat Y

1. Kewenangan administrasi salah satu komponen/unsur otonomi daerah
2. Kewenangan pimpinan sudah diatur dengan tegas
3. Prosedur administrasi pelaksanaan otonomi daerah
4. Struktur pemerintah kecamatan sudah ditetapkan dengan sistematis
5. Pembagian tugas camat dengan instansi lainnya
6. Alokasi kekuasaan tempat bekerja sesuai dengan “the right man and the right place”
7. Kekuasaan/kewenangan sudah dapat dilaksanakan
8. Camat melaksanakan kerja sama dengan unsur muspika
9. Pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya
10. Camat melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan
11. Camat melaksanakan fungsinya sebagai administrator pemerintah
12. Pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi daerah
13. Otonomi daerah adalah tujuan kecamatan Sipirok
14. Peran masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah daerah
15. Masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan pemrintah daerah

Tabel distribusi untuk menghitung koefisien korelasi

No	X	Y	X ²	Y ²	X.Y
1	42	45	1764	2025	1890
2	45	41	2025	1681	1845
3	42	43	1764	1849	1806
4	45	45	2025	2025	2025
5	40	41	1600	1681	1640
6	45	41	2025	1681	1845
7	39	41	1521	1681	1599
8	32	31	1024	961	992
9	31	31	961	961	961
10	33	41	1089	1681	1353
11	41	45	1681	2025	1845

12	38	45	1444	2025	1710
13	41	45	1681	2025	1845
14	35	45	1225	2025	1575
15	33	31	1089	961	1023
16	45	45	2025	2025	2025
17	43	45	1849	2025	1935
18	43	32	1849	1024	1376
19	41	32	1681	1024	1312
20	44	43	1936	1849	1892
21	44	43	1936	1849	1892
22	45	43	2025	1849	1935
23	45	41	2025	1681	1845
24	43	41	1849	1681	1763
25	45	45	2025	2025	2025
26	44	41	1936	1681	1804
27	42	45	1764	2025	1890
28	39	45	1521	2025	1755
29	45	41	2025	1681	1845
30	44	45	1936	2025	1980
31	44	45	1936	2025	1980
32	44	45	1936	2025	1980
jumlah			55172	56806	55188

Adapun pengujian hipotesis di dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis Alternatif (H_a) = Terdapat hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan otonomi daerah di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapsel yang artinya manajemen sumber daya manusia berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapsel.

Hipotesis Nol (H_0) = Tidak terdapat hubungan antara kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah di kecamatan Tapsel. Yang artinya kemampuan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapsel.

Guna melakukan pengujian hipotesis tersebut peneliti menggunakan product moment cekrelation, dimana dihitung berdasarkan data yang telah diolah yaitu berdasarkan tabulasi jawaban responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (variabel X) dan tabulasi jawaban responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah (variabel Y). Yang kemudian akan digabungkan dalam bentuk tabel distribusi koefisien korelasi variable X dan variable Y, dari data yang ada dan telah diolah ditemukan:

$$n = 32$$

$$\sum X = 1322$$

$$\sum Y = 1328$$

$$\sum X^2 = 55172$$

$$\sum Y^2 = 56806$$

$$\sum XY = 55188$$

Dari nilai tersebut maka dapat dicari harga r_{xy} adalah

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{32x55188 - (1322)(1328)}{\sqrt{\{32x55172 - (1322)^2\}x\{32(56806) - (1328)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{1766016 - 1755616}{\sqrt{\{1765504 - 1747684\}x\{1817792 - 1763584\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{1766016 - 1755616}{\sqrt{17820x 54208}}$$

$$r_{xy} = \frac{10400}{\sqrt{965986560}}$$

$$r_{xy} = \frac{10400}{31080,32}$$

$$rx \text{ r̄} = 0,334$$

Hasil perhitungan tersebut menghasilkan $r_{xy} = 0,334$ dengan melihat tabel r tabel yakni sample 32 dengan taraf signifikan 10%, maka nilai r tabel tersebut adalah 0,449 hal ini berarti nilai r temuan yang nilainya 0,334 lebih kecil dari pada r tabel yaitu 0,449 maka dari itu hipotesis nol tidak diterima (H_0).

SIMPULAN

Variabel kemampuan sumber daya manusia mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yang dapat diketahui dasri hasil temuan sebesar 0,334 pada tingkat kepercayaan sebesar 10% (0,449) dan ini berarti signifikan karen hasil temuan lebih besar dari tingkat kepercayaan (0,334<0,449) maka hipotesis ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan SP, Malayu, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Kencana, Inu, 2000, Sistem Pemerintahan Daerah, PT. Mekar Jaya, Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia No.32, 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang 1945, 1994, PT. Offset Seroja, Medan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim.